

## DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, Siti dan Nahar, 2012. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Volume 08 No. 02 Tahun 2012.
- Atika Rizki, 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Skripsi. Fakultas ekonomi dan bisnis. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Erlina, Omar Sakti Rambe, dan Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua; Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2009, *Aplikasi Analisis Multivalate dengan Program SPSS*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hehanussa, Salomi J. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. *Jurnal, UNISSULA*.
- [Http://kbbi.web.id/aksesibilitas.html](http://kbbi.web.id/aksesibilitas.html). Diakses pada 23 April 2017. Pukul 14.00.
- Indeks Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Magdalena, Maria dan Hesti Kurniawati. 2016. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Artikel Ilmiah. 2016.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Nasution, Saufi Iqbal. 2009. Pengaruh Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Skripsi. USU.

- Priyatno, Duwi. 2012. *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta: Andi.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sagala, Marjuki, 2011, Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Sanjaya, Krisna Putra, Dewa Nyoman, dkk. 2014. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. *Jurnal Ekonomi*, Volume 2 No. 1 Tahun 2014.
- Sande, Peggy. 2013. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Sumatera Utara.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Wahyuni, Putu Sri dkk, 2014. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi Program S1, Volume 2 No. 01 Tahun 2014.

Wiyana, dan Sutrisna, 2016. Determinan Aksesibilitas dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Syariah Paper Accounting FEB UMS. ISSN 2460-0784